

**ANALISIS IMPLEMENTASI APLIKASI SIPKD PADA DINAS
PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
DAERAH (DPPKAD) KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Jurusan Akuntansi Sebagai
Salah satu Persyaratan guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



**STEFANI COSTA LINGGA
2010 – 57963**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIII
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

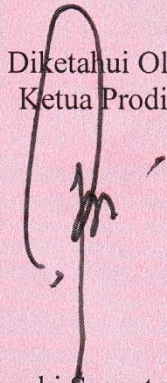
PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS IMPLEMENTASI APLIKASI SIPKD PADA DINAS PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH (DPPKAD) KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA**

Nama : Stefani Costa Lingga
NIM : 57963
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

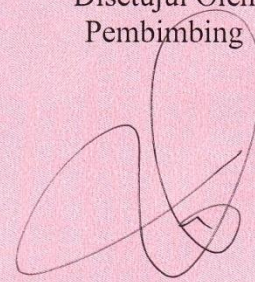
Padang, 15 Agustus 2013

Diketahui Oleh
Ketua Prodi



Perengki Susanto, SE, M.Sc
NIP. 19810404 200501 1002

Disetujui Oleh
Pembimbing



Deviani, SE, M.Si, Ak
NIP. 196906101998022001

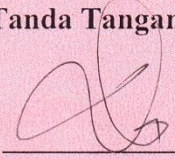
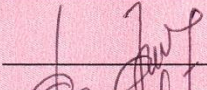
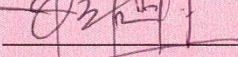
PENGESAHAN TUGAS AKHIR
ANALISIS IMPLEMENTASI APLIKASI SIPKD PADA DINAS
PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
(DPPKAD) KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Nama : Stefani Costa Lingga
NIM : 57963
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, 15 Agustus 2013

Tim Penguji,

Nama		Tanda Tangan
1. Ketua	: Deviani, SE, M.Si, Ak	1. 
2. Anggota	: Lili Anita, SE, M.Si, Ak	2. 
3. Anggota	: Halmawati, SE, M.Si	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Stefani Costa Lingga
Thn. Masuk/NIM : 2010 / 57963
Tempat/Tgl. Lahir : Ma. Bungo/ 14 Januari 1992
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Keahlian : Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Pelabuhan Baru, RT : 001/ RW : 001, Kelurahan Jayasetia,
Kec. Pasar Muara Bungo, Jambi
Judul Tugas Akhir : Implementasi Aplikasi Sipkd Pada Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah (DPPKAD)
Kabupaten Lima Puluh Kota
No HP : 087895988826

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan dari pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini Tidak terdapat Karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti cara penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya tandatangani dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Padang, Juli 2013

Yang menyatakan


Stefani Costa Lingga
NIM 57963

ABSTRAK

STEFANI COSTA LINGGA : Implementasi aplikasi SIPKD pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah (DPPKAD) kabupaten Lima Puluh Kota

Pembimbing : Deviani, SE, M.Si, Ak

Aplikasi SIPKD adalah singkatan dari Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan seperangkat aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan efektifitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, *akuntabel* dan *auditebel*. Dengan adanya aplikasi SIPKD ini, dapat lebih meringankan pekerjaan para pegawai di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti bagaimana implementasi SIPKD di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lima Puluh Kota. Karena aplikasi ini merupakan sebuah program yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Penulis mendeskripsikan bagaimana proses dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD . Data yang dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pimpinan atau karyawan yang bersangkutan mengenai pelaksanaan aplikasi SIPKD di Dinas tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh tersebut peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa implementasi SIPKD saat ini masih dalam tahap pengembangan meskipun output yang dihasilkan telah sesuai dengan target yan diinginkan. Diperlukan adanya pelatihan-pelatihan khusus bagi para pengguna aplikasi agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan SIPKD tersebut.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT , karena berkat karunia dan rahmatnya jualah penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Tugas Akhir ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan pada Jenjang Program Diploma Tiga (DIII), Program Studi Akuntansi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Negeri Padang.

Dalam penulisan ini, penulis menemui beberapa kesulitan dan rintangan, oleh karena itu penulis mendapat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Tanpa bantuan tersebut, maka penulis tidak dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik.

Oleh karena itu penulis dengan kerendahan hati yang tulus mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, Drs, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang .
2. Bapak Dr Perengki Susanto, SE, M.Sc Selaku Prodi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang .
3. Ibu Deviani SE, M.Si, Ak Atas bimbingan dan bantuannya dalam menyelesaikan TugaS Akhir ini. Sungguh, setiap bimbingan yang ibu berikan telah mendorong penulis untuk terus menyempurnakan Tugas akhir ini.
4. Segenap pendidik (dosen) dan civitas akademika Universitas Negeri Padang atas Ilmu dan waktu untuk terus berbagi .

5. Bapak Awaluddin, SE, MM selaku Kepala Dina Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aseet Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota .
6. Ibuk Atma Lailawaty, SE, M.Si selaku Kepala Bidang Akuntansi .
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu di ruangan Akuntansi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas akhir ini .
8. Ayah dan Bunda, serta keluarga, berkat do'a, cinta dan dukungan mereka yang tulus .
9. Teman-teman yang selalu memberi perhatian dan memotivasi selama ini .

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, karena itu penulis dengan senang hati menerima saran dan kritikan yang konstruktif demi kesempurnaan penyusunan laporan magang ini. Besar harapan penulis semoga laporan magang ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi, rekan-rekan mahasiswa Jurusan Akuntansi (DIII) FE UNP khususnya serta para pembaca umumnya.

Padang, Juli 2013

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengelolaan Keuangan Daerah	6
B. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	13
1. Pengertian sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	13
2. Aplikasi	18
3. Sistem yang Digunakan	27
4. Implementasi	32
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	
A. Bentuk Penelitian	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
C. Rancangan Penelitian	35
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Profil Instansi	37
1. Sejarah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten lima Puluh Kota	37
2. Visi	38

3. Misi	39
4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	39
B. Pembahasan	49
1. Pelaksanaan aplikasi dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	50
2. Permasalahan yang Terjadi Dalam Menyelesaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	56
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Skema pengelolaan keuangan daerah	7
Gambar 1.2 Diagram Konteks Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	15
Gambar 1.3 Akuntansi dan pertanggungjawaban APBD	17
Gambar 1.4 Siklus pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di DPPKAD Kab. Lima PuluhKota.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Neraca Kab. Lima Puluh Kota TA 2010-2009
Lampiran 2. LRA Kab. Lima Puluh Kota TA 2010-2009
Lampiran 3. Arus Kas Kab. Lima Puluh Kota TA 2010-2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan sistem informasi pada organisasi saat ini telah mengalami peningkatan. Hal ini disampaikan oleh Westland dan Clark (2000) dalam Handayani (2005) bahwa penggunaan sistem dalam organisasi meningkat secara dramatis. Peningkatan ini selain dikarenakan tuntutan organisasi modern, juga disebabkan oleh masyarakat yang haus akan informasi. Sistem informasi akan membantu organisasi untuk menyajikan informasi secara cepat, akurat dan terbuka seperti yang diharapkan oleh masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah berusaha mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan cara membangun teknologi informasi di bidang keuangan atau akuntansi. Salah satu implementasi pemerintah yang menerapkan pemanfaatan teknologi informasi untuk kegiatan sehari-hari bidang akuntansi adalah penggunaan sistem informasi pengelola keuangan daerah (SIPKD). SIPKD Merupakan aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditable.

SIPKD juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi Departemen Dalam Negeri terhadap pemerintah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi dalam menginprestasikan dan mengimplementasikan berbagai peraturan perundang-undangan dalam bentuk sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Selain keunggulan dari aspek operasional dan teknologi, SIPKD juga memberikan kemudahan bagi pihak manajemen. Peningkatan kualitas perencanaan, Peningkatan efisiensi pengalokasian dan pengelolaan sumber daya, Peningkatan pengendalian dan monitoring saldo kas, Analisa laporan keuangan dan Analisa kinerja satuan kerja yang kesemuanya itu merupakan solusi yang dapat memudahkan bagi manajemen keuangan daerah.

Dalam hal ini, Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Jadi, implementasi SIPKD adalah pelaksanaan sistem informasi yang telah disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan efektifitas dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah.

Kegiatan Pengembangan dan Implementasi SIPKD-Regional SIKD yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan sejak awal Tahun 2008, telah selesai pada bulan Oktober 2010 yang lalu. Berdasarkan monitoring dan laporan para konsultan, saat ini terdapat 105 daerah yang masih memiliki komitmen untuk melanjutkan implementasi SIPKD, meskipun ada beberapa daerah yang hingga saat ini belum

menunjukkan komitmen yang nyata untuk melaksanakan implementasi karena beberapa persoalan internal masing-masing daerah.

Pada Tahun 2011 dari 105 daerah implementasi, kurang lebih terdapat 51 daerah yang sedang melaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan TA. 2010. Penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi SIPKD pada tahun ini bukan lah yang pertama, karena sesungguhnya sejak Tahun 2008, SIPKD sudah mampu memberikan support yang nyata dalam penyusunan laporan keuangan, salah satu contohnya adalah Laporan TA. 2008 Provinsi Sumatera Barat.

Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu output yang dihasilkan dari Modul Pertanggungjawaban pada Aplikasi Modul Core System. Modul Pertanggungjawaban ini pun juga mengikuti pengembangannya dalam 3 (tiga) tahun ini. Mulai dari versi Alpha hingga versi Release. Meskipun demikian secara teknis sejak masih versi Beta, aplikasi sudah mampu memberikan hasil yang memang dibutuhkan oleh pemerintah daerah yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran.

Seiring dengan Pengembangan dan Implementasi SIPKD, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lima Puluh Kota pun telah melaksanakan pengelolaan keuangan daerah berupa penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi SIPKD. Tetapi dalam kenyataannya, DPPKAD Kabupaten Lima Puluh Kota hanya mampu mengeluarkan Laporan Realisasi Anggaran dari aplikasi yang telah disediakan pemerintah tersebut yang berupa SIPKD. Laporan Keuangan

Pemda lainnya disusun secara manual, tidak menggunakan SIPKD. Jadi, permasalahan yang ada disini adalah belum terwujudnya dengan maksimal pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa LK Pemda yang secara keseluruhan seharusnya di output dari SIPKD.

Atas dasar ini, penulis melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Implementasi SIPKD Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lima Puluh Kota**”

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam pengerjaan Tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menggunakan aplikasi SIPKD pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Apa saja masalah yang terjadi dalam proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lima Puluh Kota?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menggunakan aplikasi SIPKD pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Menemukan solusi atas masalah yang terjadi dalam proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lima Puluh Kota

D. Manfaat Penelitian

1. Dapat mengetahui proses pelaksanaan aplikasi SIPKD dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Dapat mengatasi masalah yang terjadi dalam proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lima Puluh Kota

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. DPPKAD Kabupaten Lima Puluh Kota sudah menerapkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan sistem Akuntansi Pemerintahan sudah menggunakan sistem terkomputerisasi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
2. Laporan yang dibuat telah selesai tepat waktu untuk diperiksa oleh BPK.
3. Secara substansial aplikasi SIPKD dibagi menjadi 2 (dua) bagian, terdiri dari *Core system* dan *Non Core System*. DPPKAD Kab. Lima Puluh Kota menggunakan Core System dalam melakukan penatausahaan.
4. Dalam implementasinya, hanya Laporan Realisasi Anggaran yang dikeluarkan dari SIPKD oleh DPPKAD Kab. Lima Puluh Kota.
5. Permasalahan yang sering terjadi adalah masih kurangnya pemahaman user terhadap proses pelaksanaan aplikasi.

B. Saran

1. Dalam pengembangan lebih lanjut diharapkan aplikasi SIPKD di DPPKAD Kab. Lima Puluh Kota dapat diperbarui sesuai dengan tujuan dalam penyempurnaan aplikasi .
2. Sebaiknya data yang di input lebih menyeluruh, tidak hanya sebatas pendapatan dan belanja saja. Sehingga semua laporan dapat dihasilkan dari SIPKD, tidak perlu secara manual lagi.
3. Cara memperlakukan aplikasi SIPKD merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh setiap pihak baik konsultan maupun admin, karena skenario pengoperasian aplikasi sangat mempengaruhi persoalan teknis yang akan muncul pada saat penyusunan laporan maupun pada setiap interaksi operator dengan aplikasi. Oleh karena itu, perlu ada pelatihan dan edukasi lebih lanjut tentang tata cara mengoperasikannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Rama, Dasaratha V dan Jones, Frederick L. (2009). *Sistem Informasi Akuntansi*. (diterjemahkan oleh: M. Slamet Wibowo). Jakarta: Salemba Empat. 2006.
- James A. Hall. (2011). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Paturisi, Abdul Rahman. (2011). *Pembuatan Reporting Rekapitulasi Potongan Pada Modul Penatausahaan di Aplikasi SIPKD*. Studi Kasus. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Kieso. Donal. E, dkk. (2008). *Akuntansi Intermediate*. Jakarta: Erlangga.
- Nordiawan, Dedi dan Hertianti, ayuningtyas. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat
- Mulyadi. (2008). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Permendagri. (2013). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006*.
URL: hukum.unsrat.ac.id/men/permendagri_13_2006.pdf.
- Arikunto, S (2002). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- PP. (2013). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005*.
URL: hukum.unsrat.ac.id/men/pp_58_2005.pdf.
- Prasetya, Gede Edi. *Penyusunan dan analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Ed 1. Yogyakarta: Andi.
- Hariyanto. 2012. <http://belajarpsikologi.com/pendekatan-jenis-dan-metode-penelitian-pendidikan/> 5/31/2013. 11:37.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Sony Yuwono, Dwi Cahyo Utomo, Suheiry Zein, dan Azrafiany A.R. 2008. *Memahami APBD dan Permasalahannya*. Malang: Banyumedia Publishing